



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI** *Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MENUJU SWASEMBADA SUSU NASIONAL: TANTANGAN DAN STRATEGI

**Megatrikania Kendali**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[megatrikania.kendali@dpr.go.id](mailto:megatrikania.kendali@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat bahwa kebutuhan susu di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 4,4 juta ton. Sementara itu, tingkat konsumsi susu masyarakat pada tahun 2020 baru sebesar 16,27 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas konsumsi minimum yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yaitu sebesar 30 kilogram per kapita per tahun.

Dengan jumlah penduduk yang kini mencapai sekitar 280 juta jiwa, kebutuhan susu di Indonesia secara alami terus meningkat. Apabila mengacu pada standar konsumsi FAO, maka total kebutuhan susu nasional dapat melampaui 8 juta ton per tahun. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi susu segar dalam negeri pada tahun 2024 baru mencapai sekitar 808.352 ton. Angka ini hanya mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan nasional, sedangkan sisanya masih bergantung pada impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas susu dalam negeri menjadi sangat penting dan mendesak.

Sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada susu, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025–2029 dengan target kemandirian pada tahun 2029. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia diperkirakan perlu mengimpor sekitar satu juta ekor sapi perah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, hingga 10 Juli 2025 tercatat sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah diimpor ke Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN). Langkah konkret lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Greenfields Indonesia melalui impor 1.080 ekor sapi perah dari Australia. Selain itu, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produktivitas sapi perah yang sudah ada, salah satunya melalui program inseminasi buatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam rangka meningkatkan produksi susu nasional, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Di tingkat peternak, sejumlah kendala utama meliputi menurunnya populasi sapi perah akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta *lumpy skin disease* (LSD), rendahnya produktivitas harian yang hanya mencapai 8 hingga 12 liter susu per ekor, dan terbatasnya akses terhadap teknologi serta fasilitas penyimpanan yang memadai. Disamping itu, peternak juga kesulitan memperoleh pakan berkualitas dengan harga terjangkau serta menghadapi hambatan dalam akses pembiayaan untuk memperoleh bibit sapi unggul. Tidak hanya aspek teknis, tantangan struktural seperti keberadaan praktik premanisme di lapangan dan prosedur perizinan yang berbelit turut menjadi penghalang bagi pengembangan usaha peternakan sapi perah secara berkelanjutan.

Mewujudkan swasembada susu bukan semata soal memenuhi target produksi, melainkan juga menciptakan ekosistem yang mendukung peternak sebagai pelaku utama dalam rantai pangan

nasional. Untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, diperlukan strategi yang terarah dan menyeluruh. *Pertama*, peningkatan jumlah sapi perah menjadi langkah mendasar dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Langkah ini dapat ditempuh melalui optimalisasi program inseminasi buatan serta pembaruan bibit impor untuk memperbaiki kualitas genetik ternak. *Kedua*, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu diperkuat guna membuka akses permodalan yang lebih luas bagi peternak. *Ketiga*, pengembangan kelompok peternak melalui kemitraan dengan industri pengolahan susu perlu didorong, terutama melalui program pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas produksi. *Keempat*, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, seperti penyediaan fasilitas penyimpanan modern dan digitalisasi sistem penerimaan penerimaan susu, sangat penting untuk menjaga mutu rantai pasok. *Kelima*, penyederhanaan proses perizinan untuk menjadi perhatian utama guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang terarah, kebijakan yang berpihak, serta penguatan posisi peternak dalam sistem pangan nasional, swasembada susu pada tahun 2029 bukan sekadar harapan, melainkan target yang dapat dicapai melalui konsistensi, kolaborasi, dan dukungan lintas sektor.

## Atensi DPR

Komisi IV DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap upaya pencapaian swasembada susu nasional. Peran Komisi IV DPR RI dapat diwujudkan melalui dorongan kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kepentingan peternak, seperti pemberian insentif produksi dan mekanisme perlindungan harga susu yang adil. Dari sisi anggaran, Komisi IV DPR RI juga memiliki tanggung jawab memastikan adanya alokasi dana yang memadai bagi pengadaan bibit sapi unggul, pelaksanaan inseminasi buatan, pelatihan peningkatan kapasitas peternak, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Dalam fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat memantau pelaksanaan Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025–2029 dan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan perizinan yang berbelit dan praktik premanisme. Selain itu, Komisi IV DPR RI memiliki ruang untuk menginisiasi sinergi lintas kementerian serta mendorong kemitraan antara peternak dan industri pengolahan susu guna memperkuat ekosistem peternakan yang berkelanjutan.

## Sumber

antaranews.com, 15 Juli 2025;  
kompas.id, 2 Juni 2023, 27 Juni 2024, dan 3 Januari 2025;  
*Koran Jakarta*, 16 Juli 2025;  
mediaindonesia.com, 15 Juli 2025;  
republika.co.id, 15 Juli 2025; dan  
tempo.co, 11 November 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*